

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Toko Gunung Agung.
- Asshidiqie, Jimly, 2005, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshidiqie, Jimly. 2005 *.Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Jakarta : konstitusi press.
- Asshidiqie, Jimly.2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Astawa, I Gede Pantja dan Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan Di Indonesia*, Bandung, PT. Alumnii.
- Atmadja, I Dewa Gede Dkk, 2015, *Teori Konstitusi Dan Konsep Negara Hukum*, Malang, SETARA Press.
- Atoshoki, Antonius dkk, 2002, *Relasi Dengan Sesama*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Fadjar, Abdul Mukthie, 2006, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konpress.
- Fajar, Mukti dan Yulianto achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Fatkurohman, dkk, 2004, *Memahami Keberadaan Mahakamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Fatmawati, 2005, *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Harjono. 2008, *Transformasi Demokrasi*. jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

- Hoesein, Zainal Arifin. 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Isra, Saldi. 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.
- latief, Abdul dkk. 2009. *Hukum Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta : total media, 2009.
- latief, Abdul,2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Mahfud, Moh. MD. 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press.
- Mahkamah Konstitusi, 2014, *Menegakkan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2014*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Rato,Dominikus. 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Safaat, Muchamad Ali. 2011, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, Jakarta, Rajawali Press.
- Sanit, Arbi, 1997, *Partai, Pemilu, Dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
- Siahaan, Maruarar. 2008, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Yang Hidup*, Jakarta, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Siahaan, Maruarar. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Soimin dan mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.

- Suteki, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum : Budaya Oriental dan Implikasinya terhadap cara berhukum dalam perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Setjen Komisi Yudisial RI.
- Sutiyoso, Bambang, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Upaya Membangun Kesadaran Dan Pemahaman Kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya Yang Dapat Diperjuangkan Dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi*, Bandung, Citra Adi Bakti.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Syahrizal, Ahmad, 2006, *Peradilan Konstitusi, Studi Tentang Ajudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Thalib, Abdul Rasyid, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Thontowi, Jawahir. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta : Total Media.
- Tim penyusun hukum acara mahkamah Konstitusi, 2010, *hukum acara mahkamah konstitusi*. jakarta : sekretariat jenderal dan kepaniteraan MKRI.
- Zoelva, Hamdan. 2005, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Jakarta, Konpress.

JURNAL/SKRIPSI/TESIS/DESERTASI

- Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3, nomor 2, juni 2016.
- H. M. Erham Amin, Putusan Mahkamah Konstitusi Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, 1 November 2012
- Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufk, "Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945": *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010.

- M. Rezha Fahlevie, 2013, “Hukum Indonesia : Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan Yang Substantif Dalam Rangka Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Progresif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik”, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Martitah, Progresivitas Hakim Konstitusi Dalam Membuat Putusan (Analisis Terhadap Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Positive Legislature), *MMH*, Jilid 41, April 2012.
- Muhammad Yusuf Ibrahim, Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Yang Digugat Kembali Dengan Sengketa Obyek Yang Sama Tetapi Dengan Subyek Yang Berbeda, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume XII, Nomor 1, mei 2014.
- Rafiuddin, Tesis, *Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2010)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2012.
- Rio Sandy Pribadi, Hananto Widodo. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Puu-Viii/2010 Tentang Masa Jabatan Jaksa Agung”, *Jurnal Novum*, Volume. 1, Nomor 2, 2016
- Yance Arizona, 2007, “Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 UUD 1945: Perbandingan Putusan Pengujian UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Pengujian UU No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air”, Skripsi S1, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN-PUTUSAN.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Perubahan I, II, III, IV.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958).

Mahkamah Konstitusi RI, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi RI, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

ARTIKEL INTERNET

<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/11/BAB-II-Karakteristik.pdf>

https://yanearizona.files.wordpress.com/2008/11/di-balik-konstitusionalitas-bersyarat-putusan-mk_final.pdf

<http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli>

<https://miftakhulhuda.wordpress.com/2009/06/29/ne-bis-in-idem/>

<http://www.hukum-hukum.com/2016/10/menghidupkan-kembali-pasal-yang-dibatalkan.html>

<https://sudyatmikolawoffice.wordpress.com/2017/02/27/putusan-konstitusional-bersyarat-oleh-mahkamah-konstitusi/>

Luthfi Chakim, “Analisis Penafsiran Pasal 33 UUD 1945”, diakses dari

<http://www.lutfichakim.com/2011/12/analisis-penafsiran-pasal-33-uud-1945.html>